

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan. Di lihat bahwa suatu pembangunan kampung diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa merupakan suatu perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Dalam pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan Sarana dan Prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kampung bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran atau partisipasi masyarakat.

Dengan demikian masyarakat juga perlu diberikan kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan dalam proyek pembangunan, terutama di dalam penentuan proyek-proyek yang lebih di prioritaskan di kampung agar tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam pembangunan

seharusnya partisipasi masyarakat kampung Wulukubun Kecamatan Skanto diharapkan agar dalam pembangunan tersebut lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Kurangnya partisipasi masyarakat kampung Wulukubun dalam berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di kampung Wulukubun sering terhambat dan dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal khususnya dalam pembangunan fisik berupa pembangunan jalan serti, tembok penahan jalan dan saluran air.

Dalam pembangunan tersebut semuanya dilaksanakan oleh pihak kontraktor, yang sudah disepakati oleh kepala kampung, Bamuskam dan semua tokoh masyarakat di kampung Wulukubun, dan sesuai dengan program kampung yang sudah diatur, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan jalan di tiga tahun terakhir yaitu 2021, 2022 dan 2023 pembangunan tersebut terlaksana pada tahun 2021 dengan jarak 700 meter, pada tahun 2022 dan 2023 tidak terlaksana karena masalah anggaran. Jadi pembangunan jalan yang terlaksana pada tahun 2021 bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan layanan kepada masyarakat sesuai peraturan kampung, petunjuk dan hasil pemerintah daerah Kabupaten Keerom, pelaksanaan bantuan pemerintah yang dibiayai oleh Dana Kampung (DK) kampung untuk pembangunan jalan dengan sepanjang 700 Meter.

Berdasarkan pengamatan dalam melaksanakan pembangunan jalan di kampung Wulukubun tidak berjalan lancar karena pelaksanaan pembangunan masih lambat dalam penyelesaian. Kurangnya transparansi dari pemerintah setempat dengan masyarakat dana pembangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di kampung Wulukubun masih kurang adanya motivasi terhadap masyarakat, selain itu juga pemerintah setempat masih kurang dalam

menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program pembangunan. Pemerintah kampung Wulukubun melakukan proses perencanaan pembangunan tidak melibatkan masyarakat dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang dilibatkandan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang artinya masyarakat masih mempunyai kesulitan dan ketidakyamanan terhadap pembagunan fisik di kampung Wulukubun tersebut, sehingga masyarakat belum merasakan bagaimana pembangunan yang ada di kampung Wulukubun tidak ada sosialisasi kepada masyarakat tentang program pembangunan yang ada.

Berpijak dari masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik diKampung Wulukubun Kecamatan Skanto Kabupaten Keerom”.

1.2. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN DAN PEMBATAAN

MASALAH

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka Penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kampung Wulukubun Kecamatan Skanto Kabupaten Keerom?

1.2.2. Pembatasan Masalah

Untuk mengfokuskan penelitian ini, dan didasarkan atas keterbatasan penulis baik tenaga, waktu maupun biaya, maka penulis merasa perlu membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Wulukubun Kecamatan Skanto Kabupaten Keerom.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di kampung Wulukubun Kecamatan Skanto Kabupaten Keerom.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangankonsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung.
- b) Sebagai bahan referensi untuk pemerintah kampung melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kampung.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar lebih responsive terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian.
- b) Sebagai masukan dalam pemerintah kampungWulukubun agar masyarakat terus berpartisipasi dalam pembangunan.

1.4. TINJAUAN PUSTAKA

1.4.1. Partisipasi Masyarakat

Mulyadi (2009:13) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu proogram, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain

itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Windardi dalam Wiguna (2000:31) partisipasi adalah turut serta seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Seperti dimaklumi dalam kegiatan atau aktivitasnya tujuan masyarakat yang mulia, baru akan tercapai apabila ada partisipasi anggotanya, sebab dalam partisipasi terdiri atas :

1. Partisipasi dapat dipaksakan dan dapat pula suka rela.
2. Partisipasi dapat formal dan informal.
3. Partisipasi dapat bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung.

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan.

Isbandi (2007:27) Partisipasi adalah keikutsertakan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam .setiap pembangunan.

Prasetya, (2008:54)“Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

H.A.R. Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk. Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2015: 58-59) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Partisipasi secara fisik. Dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.
- b) Partisipasi secara non fisik. Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) partisipasi merupakan suatu konsep dalam ilmu sosial yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam konteks ini mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek-proyek pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini meliputi

tidak hanya partisipasi fisik dalam proyek-proyek, tetapi juga partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan dengan cara mengaktifkan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan solusi-solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta lebih diterima oleh masyarakat.

a. Prinsip-prinsip Utama:

- Pemberdayaan (Empowerment): Mendorong masyarakat untuk mengambil kontrol atas nasib mereka sendiri dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan.
- Inklusi (Inclusion): Memastikan bahwa semua kelompok masyarakat terlibat dalam proses partisipasi, termasuk yang mungkin terpinggirkan atau rentan.
- Keberlanjutan (Sustainability): Memastikan bahwa hasil pembangunan yang dicapai melalui partisipasi masyarakat dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

b. Metode dan Implementasi:

- Pendidikan dan Pelatihan: Membangun kapasitas masyarakat dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi.
- Pengorganisasian: Mendorong pembentukan organisasi masyarakat sipil yang dapat menjadi wadah partisipasi.

- Pengambilan Keputusan Bersama: Mengembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

c. Evaluasi dan Penyesuaian:

Proses partisipasi haruslah dinamis dan terbuka terhadap umpan balik dari masyarakat, serta mampu melakukan penyesuaian berdasarkan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Dwiningrum (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan Dan Ketiga, partisipasi dalam evaluasi sebagai berikut:

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan atau perencanaan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

c) Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

1. Perencanaan Partisipasi

Perencanaan partisipatif adalah suatu pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan aktifitas partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan mereka. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan tujuan, kebijakan, dan implementasi proyek pembangunan, dengan harapan dapat meningkatkan keberhasilan, keberlanjutan, dan penerimaan program tersebut.

Menurut Paulo Freire (1970) perencanaan partisipasi merupakan pendekatan penelitian aksi partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam identifikasi masalah, perencanaan tindakan, dan evaluasi hasil untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan.

berdasarkan International Association for Public Participation (IAP2) menyatakan bahwa perencanaan Partisipasi adalah mengklasifikasikan berbagai tingkatan partisipasi masyarakat dari informasi hingga keputusan bersama. Ini memberikan panduan bagi praktisi untuk merancang dan mengelola proses partisipasi yang efektif dalam konteks perencanaan dan pengambilan keputusan.

2. Tingkat Partisipasi

Dilihat dari tahapan atau tingkat partisipasi, Wilcox (1994) mengemukakan adanya 5 tingkatan, yaitu:

1. Memberikan informasi
2. Konsultasi yaitu memberikan pendapat, sebagai pendengar yang baik guna memberikan umpan balik, akan tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap gagasan, ide, pilihan-pilihan serta, menambahkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama, dalam arti tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga ikut serta dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Memberikan dukungan, dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan dukungan, pendanaan dan nasehat lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung adalah kunci untuk mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berbagai model partisipasi dapat diterapkan dalam konteks pembangunan yang ada di kampung, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Kendati demikian Arnstein, S. R. (1969) mengatakan bahwa Partisipasi Penuh atau Total, melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat kampung dalam semua tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Masyarakat dilibatkan dalam forum-forum partisipatif, seperti pertemuan kampung atau kelompok kerja dalam pembangunan kampung, di mana keputusan diambil secara kolektif dan kolegal.

1.4.2. Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, salah satu usaha untuk meningkatkan pembangunan Desa sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Desa dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri.

Ginanjar Kartasasmita (1997 : 9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Upaya untuk

memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi multi interpretable namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Kodoatie,(2003:9). Sistem pembangunan merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Subandi: (2011:9-11) pembangunan adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Arief Budiman (2000:25) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.

Husein Umar (2004:8), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumber daya.

1. Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan Desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian Desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan Desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan Desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan Desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kansil (1983: 251) yaitu:

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.

3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk Desa-Desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan Desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.
6. Pembangunan Desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

2. Pembangunan Komunitas

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) Pembangunan Komunitas adalah pendekatan dalam bidang pembangunan yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam merancang dan mengelola perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri, menemukan solusi yang sesuai, dan mengimplementasikannya secara berkelanjutan.

a) Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan komunitas menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat lokal untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Hal ini melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan lokal. Teori ini juga mencakup aspek penguatan kapasitas individu dan kelompok dalam komunitas. (Cohen, J. & Uphoff, N., 1977)

b) Modal Sosial

Modal sosial mengacu pada jaringan hubungan sosial, norma, dan nilai yang memfasilitasi kerja sama dalam suatu masyarakat. Konsep ini menyoroti pentingnya hubungan sosial yang kuat dalam menciptakan kepercayaan, saling ketergantungan, dan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan komunitas. Modal sosial juga membantu dalam mengelola konflik dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. (Putnam, R.D., 1993).

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory) mengacu pada pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan

kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, menurut Brundtland (1987) dan Sachs (2015).

pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa aspek utama yaitu sebagai berikut:

- a. **Dimensi Ekonomi:** Fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan produktivitas, dan pembukaan peluang ekonomi bagi masyarakat.
- b. **Dimensi Sosial:** Memastikan bahwa pembangunan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta partisipasi dan akses masyarakat terhadap keputusan pembangunan.
- c. **Dimensi Lingkungan:** Menjaga keberlanjutan lingkungan alam, termasuk perlindungan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- d. **Pendekatan Interdisipliner:** Memanfaatkan berbagai pendekatan ilmiah dan pengetahuan dari berbagai disiplin seperti ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu politik, ilmu lingkungan, teknik, dan lain-lain untuk memahami tantangan dan mencari solusi yang holistik.
- e. **Kerjasama Internasional:** Mengakui bahwa tantangan pembangunan berkelanjutan tidak mengenal batas negara, sehingga memerlukan

kerjasama internasional dalam bentuk kebijakan, perjanjian, dan inisiatif bersama.

- f. Implementasi dan Evaluasi: Pentingnya implementasi kebijakan dan praktik pembangunan berkelanjutan serta evaluasi dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan (governance) mengacu pada cara pemerintah dan lembaga publik lainnya diatur, dioperasikan, dan diawasi. Konsep ini membahas bagaimana kekuasaan dan sumber daya diatur serta bagaimana keputusan dibuat dalam konteks pemerintahan yang baik dan efektif. Pengertian Teori Tata Kelola Pemerintahan Teori tata kelola pemerintahan mengacu pada proses dan struktur di mana otoritas publik dijalankan dan diatur. Ini melibatkan elemen seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan aturan hukum. Berikut adalah pengertian dari beberapa ahli

- a. Friedrich Hayek (1944): Hayek adalah salah satu tokoh awal yang menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam mewujudkan kebebasan individual dan efisiensi ekonomi. Meskipun bukan secara langsung membahas tata kelola pemerintahan modern, gagasannya tentang aturan hukum dan kebebasan individual menjadi landasan penting.
- b. Robert Dahl (1961): Dahl mengembangkan konsep "polyarchy" yang menggambarkan demokrasi modern yang lebih kompleks

daripada sekadar representasi politik tetapi juga mencakup partisipasi aktif, akses yang adil terhadap informasi, dan kontrol terhadap kekuasaan politik.

- c. Joseph Nye (1990-an): Nye memperkenalkan konsep "tata kelola yang baik" (good governance), yang menekankan pentingnya lembaga pemerintahan yang kuat, proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabilitas yang tinggi, dan partisipasi masyarakat yang luas untuk mencapai hasil yang efektif dan adil.
- d. World Bank (1992): Organisasi ini memainkan peran kunci dalam mempopulerkan konsep tata kelola yang baik sebagai prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan efektif, termasuk dalam memerangi korupsi dan meningkatkan efisiensi sektor publik.
- e. Mark Bevir (2005): Bevir mengembangkan pendekatan interpretatif terhadap tata kelola, menekankan pentingnya makna dan konteks dalam analisis tata kelola pemerintahan, yang berbeda dari pendekatan positivistik yang lebih tradisional.

1.4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan dan Pengaruh Politik: Tingkat keterlibatan politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pembangunan. Masyarakat yang merasa memiliki pengaruh dan memiliki akses

untuk berpartisipasi dalam proses politik cenderung lebih aktif dalam pembangunan.

2. **Akses Terhadap Informasi:** Ketersediaan dan akses masyarakat terhadap informasi tentang proyek-proyek pembangunan, kebijakan publik, dan hak-hak mereka sangat penting. Masyarakat yang mendapatkan informasi yang cukup memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dan memberikan masukan yang relevan.
3. **Pendidikan dan Kesadaran:** Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pembangunan dan hak-hak mereka juga berpengaruh. Masyarakat yang lebih terdidik dan sadar akan kepentingan bersama cenderung lebih aktif dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan.
4. **Kemampuan Ekonomi:** Kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat yang lebih sejahtera secara ekonomi mungkin lebih mampu untuk terlibat dalam inisiatif pembangunan dan investasi dalam proyek-proyek lokal.
5. **Kepemimpinan dan Kapasitas Organisasi:** Kualitas kepemimpinan lokal dan kapasitas organisasi masyarakat sipil atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya juga penting. Organisasi yang kuat dan kepemimpinan yang efektif dapat memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
6. **Kondisi Sosial dan Budaya:** Nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial dalam masyarakat mempengaruhi cara masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Ini termasuk kepercayaan, tradisi partisipasi, dan norma-norma terkait kehidupan masyarakat.
7. **Keadilan Sosial dan Aksesibilitas:** Keadilan sosial, termasuk aksesibilitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, juga berpengaruh. Masyarakat yang merasa adil dan memiliki akses yang layak terhadap sumber daya dan layanan publik umumnya lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan.

1.5. DEFINISI KONSEP DAN OPERASIONAL INDIKATOR

1.5.1. Definisi Konsep

Definisi Operasional menurut Kerlinger (1996:51) adalah meletakkan arti pada suatu konstruk atau variabel dengan menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu, “Partisipasi Masyarakat” sebagai Variabel bebas dan “Pembangunan” sebagai variabel terikat, yang secara operasional didefinisikan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan. Dilihat bahwa suatu pembangunan desa diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan didalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa merupakan suatu perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua.
- 2) Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk penanggulangan kemiskinan.

1.5.2. Operasional Indikator

Tabel 1.1. Operasional Indikator

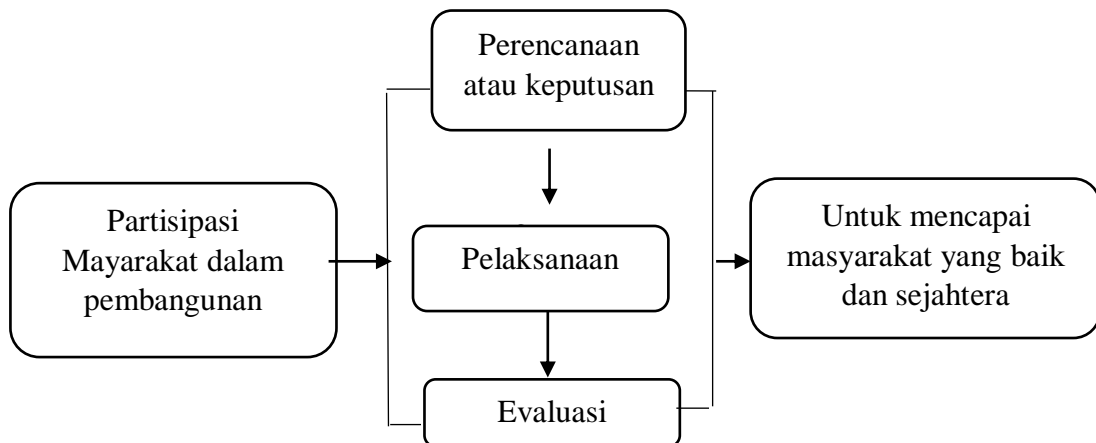
Fokus Bahasan	Indikator
Partisipasi Masyarakat	1. Perencanaan atau pengambilan keputusan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi
Pembangunan	1. Partisipasi (Participation) 2. Keadilan Sosial 3. Kesempatan kerja untuk semua (work for all) 4. Kemandirian

Sumber Data : Olahan Penulis 2024

1.6. KERANGKA BERPIKIR

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

Teori Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Dwiningrum (2011:61-63)



Sumber: Olahan penulis

Dari kerangka berpikir diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kampung Wulukubun merupakan suatu upaya yang cukup baik dari pemerintah dalam memberikan bantuan

melalui program-program dari pemerintah agar tercapainya pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan karena masyarakat yang akan secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung Wulukubun dan yang terpenting adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang ada di kampung Wulukubun sehingga pembangunan yang sudah dibangun dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat setempat.

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan fokus penelitian mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kampung Wulukubun Kecamatan Skanto Kabupaten Keerom.

1.7.2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu

a. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan pertama, dengan teknik sampling purposive. Teknik ini digunakan untuk menyeleksi dan memilih informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap. Sederhananya disebut sebagai informan yang akurat. Penggunaan teknik purposive ini, peneliti dapat menentukan sampling sesuai dengan tujuan

penelitian. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kampung
- 2) Ketua Bamuskam dan Wakil Bamuskam
- 3) Sekretaris Kampung
- 4) Kaur Pemerintahan
- 5) Kaur Umum
- 6) Kaur Pembangunan
- 7) Kaur Keuangan
- 8) RT
- 9) RW
- 10) Tokoh Masyarakat

b. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dalam penelitian ini bisa berupa catatan tertulis, rekaman, gambar atau benda yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan fokus penelitian.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

a) Observasi

Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian terhadap objek yang diteliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah penulis melakukan tanya jawab dengan responden(Masyarakat) terhadap Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan fisik di kampung Wulukubun Kecamatan Skanto Kabupaten Keerom,dan hasil wawancara ini berupa data kualitatif yang digunakan untuk melengkapi pembahasan dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi

Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

1.7.4. Teknik Pengolahan Data

Menurut Hasan (2006: 24), pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan caracara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut (Sudjana, 2001: 128).

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan komputasi program microsoft Excel karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu dekriptif dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya (Sugianto, 2007: 1).

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data serta mengimpretasikan data yang diperoleh dilapangan dari para informan, hasil pengamatan, serta data dokumen lainnya. Analisis ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, informasi yang kemudian diperoleh dan dianalisis sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran yang dapat mengungkapkan jawaban dan hasil yang akan di teliti. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:16).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan subyek atau narasumber, peneliti selanjutnya merangkum dari hasil wawancara, memilih data atau informasi berdasarkan apa yang kita cari atau berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tentukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Pada langkah menganalisis ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau mengkategorikan agar data yang peroleh lebih jelas.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data.